

## **Pengaruh Pembebasan BBNKB, Tingkat Pendapatan Dan Program Pemutihan PKB Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Di Kota Sukabumi)**

Ferlina Sukma Syafitri<sup>1)</sup>  
[ferlinasukma@ummi.ac.id](mailto:ferlinasukma@ummi.ac.id)

Ade Sudarma<sup>2)</sup>  
[adesudarma@ummi.ac.id](mailto:adesudarma@ummi.ac.id)

Irfan Sophan Himawan<sup>3)</sup>  
[irfan.sophan@gmail.com](mailto:irfan.sophan@gmail.com)

<sup>1)2)3)</sup>Universitas Muhammadiyah Sukabumi

### **ABSTRAK**

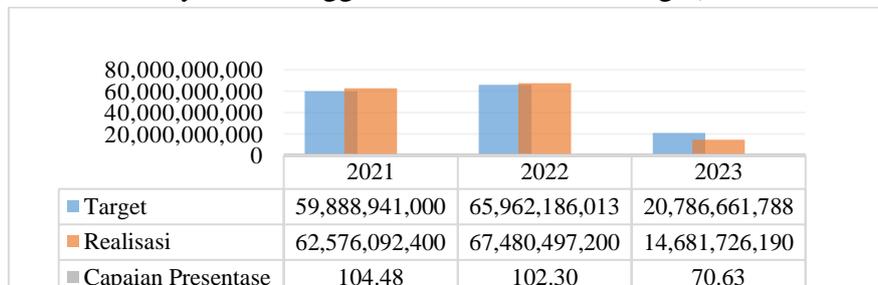
Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu masalah paling penting dalam meningkatkan pendapatan daerah, namun rendahnya tingkat kepatuhan seringkali menjadi kendala dalam optimalisasi penerimaan pajak. Untuk mengatasinya pemerintah telah mengeluarkan program untuk meringkankan beban wajib pajak dengan menghapus denda pajak seperti program pemutihan dan pembebasan BBNKB tujuannya untuk mendorong wajib pajak dalam membayar pajaknya. Selain itu, tingkat pendapatan juga dapat memengaruhi kepatuhan pajak secara internal. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis apakah ada pengaruh dari program pemerintah yang bertujuan meringkankan beban wajib pajak, seperti program pemutihan dan pembebasan BBNKB, serta faktor internal seperti tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel menggunakan *non probability sampling* yaitu *Accidental sampling* di mana sampel diambil secara kebetulan dari individu yang dijumpai peneliti jika dianggap sesuai sebagai sumber data. Sampel penelitian ini sebanyak 100 responden wajib pajak dikota sukabumi. Data di analisis menggunakan teknik regresi linier berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 29. Hasil penelitian menunjukkan jika Pembebasan BBNKB, Tingkat Pendapatan, Program Pemutihan PKB secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dikota sukabumi. Secara simultan Pembebasan BBNKB, Tingkat Pendapatan, Program Pemutihan PKB berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dikota sukabumi.

Kata kunci: Pembebasan BBNKB, Tingkat Pendapatan, Program Pemutihan PKB, Kepatuhan Wajib Pajak

**PENDAHULUAN**

Pajak merupakan salah satu cara suatu negara mendapatkan uang rakyat yang tujuannya untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan umum. Sebagian besar dana pemerintah berasal dari pajak. Berdasarkan tempat penerimaannya pajak pusat yang dikelola pemerintah melalui DJP sedangkan pajak daerah di pungut pemerintah daerah setempat. UU No 1 Tahun 2022 menetapkan kaitan pemerintah pusat dan daerah. Dalam pasal 4 menjelaskan pajak daerah memiliki beberapa ruang lingkup yaitu pajak kab/kota dan provinsi. Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, BBNKB, Pajak Bahan Bakar Kendaraan dan PKB dikelola di tingkat provinsi. (Alifatu Mazidah, 2022).

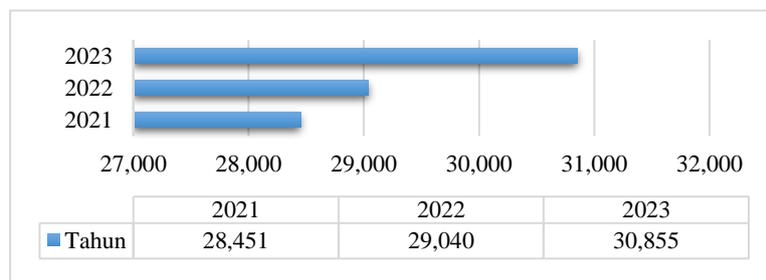
PKB menjadi salah satu sumber PAD yang penting, karena mobilitas telah menjadi sebuah kebutuhan bagi Masyarakat. Pemerintah berusaha menaikkan tarif pkb untuk mengumpulkan lebih banyak pendapatan dari sektor ini. Namun, kesadaran mengenai pentingnya membayar PKB bagi pemilik baru maupun lama, terutama dengan tetras meningkatnya jumlah kendaraan. Di kota sukabumi, tercatat hampir 4.000 kendaraan lebih dari satu tahun masih banyak menunggak dan tidak daftar ulang. (Garis NB, 2023).



**Gambar 1 Target dan Realisasi Penerimaan PKB 2021-2023**

(Sumber : Data diolah penulis, 2024)

Menurut gambar dari grafik diatas, pendapatan PKB meningkat pada tahun 2022 hingga mencapai target sekitar 102,30 setelah mencapai target 104,48 pada tahun 2021. Namun, tahun 2023 tidak mencapai target sebesar 70,63. Grafik di atas menunjukkan bahwa penerimaan pkb di kota sukabumi masih belum konsisten. Hal ini sebagian penyebabnya karena wajib pajak masih ada yang belum patuh. Oleh karena itu, pencapaian pendapatan pajak ini perlu ditingkatkan melalu berbagai langkah, termasuk inovasi dalam intensifikasi perpajakan.

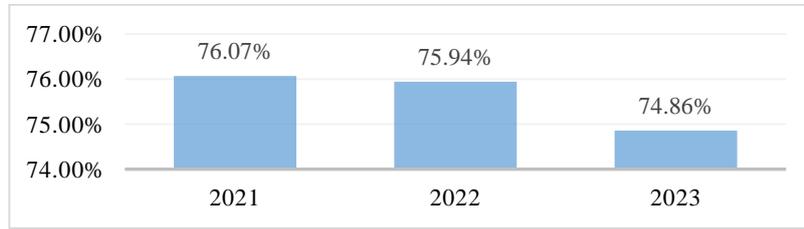


**Gambar 2 Kendaraan yang Menunggak Tahun 2019-2022**

(Sumber : Open data Jabar, diolah penulis, 2024)

Masih ada kendaraan kendaraan di kota sukabumi yang menunggak PKB terlihat pada gambar grafik diatas. Jumlah kendaraan menunggak sekitar 28.451 pada tahun 2021, jumlah meningkat menjadi 29.040 pada tahun 2022 dengan selisih sekitar 589 kendaraan. Meningkatkan

lagi sekitar 1.815 menjadi 30.855 pada tahun 2023. Terlihat kendaraan yang menunggak menaik setiap tahunnya di kota sukabumi, membuktikan bahwa masih adanya ketidakpatuhan wajib pajak.



**Gambar 3 Persentase Wajib Patuh di Kota Sukabumi**

(Sumber : Open data jabar, diolah penulis, 2024)

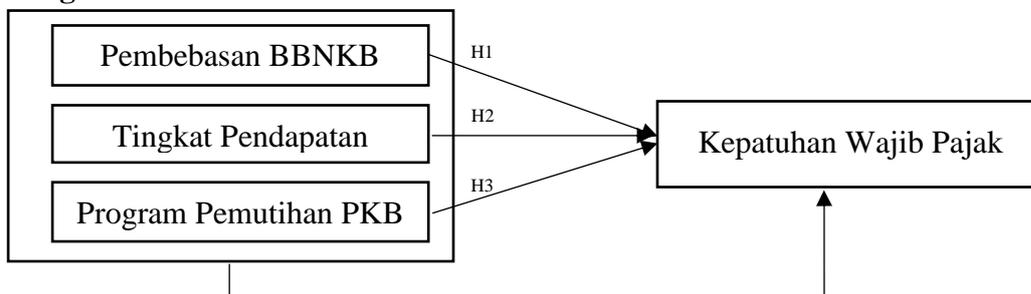
Dilihat dari grafik diatas, wajib pajak yang patuh memiliki presentase sekitar 76,07% tahun 2021 dan turun menjadi 75,94% pada tahun 2022. Kemudian, turun menjadi 74,86% pada tahun 2023. Penurunan yang konsisten dalam jumlah wajib pajak yang patuh menunjukkan bahwa di sukabumi masih tergolong rendah.

Kepatuhan pajak merupakan salah satu masalah terpenting dalam sistem perpajakan yang mempengaruhi otoritas pajak di seluruh dunia dan juga di Indonesia. Setiap wajib pajak di suatu negara memiliki kewajiban untuk menegakkan kepatuhan wajib pajak demi menjaga stabilitas ekonomi. Wajib pajak yang bersedia memenuhi tanggung jawabnya akan membantu pemerintah mengumpulkan uang secara efisien, stabil dan berkelanjutan sehingga dapat membiayai Pembangunan infrastruktur dan program lainnya (Sumarno Manrejo, 2023)

Secara sederhana, kepatuhan wajib pajak berarti memahami dan mengikuti aturan pembayaran pajak sesuai peraturan yang berlaku. Apabila wajib pajak tidak mematuhi pembayaran PKB, penerimaan pajak tidak optimal (Cong & Agoes, 2019). Untuk memaksimalkan penerimaan pendapatan, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap pajak pemerintah berharap sumber PKB akan meningkat sesuai jumlah kendaraan bermotor yang meningkat (Cellynia D & Marlinah, 2022).

## KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS

### Kerangka Pikir



**Gambar 4 Kerangka Pikir**

### Hipotesis

#### Pembebasan BBNKB Terhadap Kepatuhan wajib pajak

Secara umum, BBNKB merupakan pajak yang harus dibayar ketika kepemilikan dari kendaraan berpindah tangan, dan biasanya pemilik kendaraan harus membayar bea yang cukup besar saat melakukan BBN. Dengan adanya kebijakan dari pemerintah berupa

pembebasan BBNKB, pemilik hanya perlu membayar SWDKLLJ dan PNPB. Tujuan dari Pembebasan BBNKB yaitu meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui cara, memberikan keringanan berupa pengurangan beban pajak dalam proses ketika kepemilikan kendaraan berganti. Dalam Silviani & Liswanti Ina, (2024) menemukan adanya pengaruh pembebasan BBNKB dan kepatuhan wajib pajak. Namun dalam Lestari et al., (2023) tidak adanya pengaruh pembebasan bea balik nama pada kepatuhan wajib pajak.

H1 : Pembebasan BBNKB berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan wajib pajak**

Tingkat pendapatan merupakan penghasilan yang diterima berasal dari tempat kerja dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup (Fatmawati & Adi, 2022). Dalam Pranata et al., (2022) faktor internal dan eksternal bisa menjadi pengaruh bagi ketidakpatuhan wajib pajak. Salah satu faktor yaitu tingkat pendapatan merupakan pengaruh dari faktor internal. Tingkat pendapatan mencerminkan kemampuan seseorang untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Wajib pajak dengan penghasilan tinggi cenderung lebih mudah dalam membayar pajak, sementara wajib pajak dengan penghasilan rendah mungkin mengalami kesulitan karena kebutuhan dasar mereka menjadi prioritas. Oleh karena itu, tingkat pendapatan dapat memengaruhi perilaku seseorang dalam mematuhi aturan pajak. (Alfian et al., 2024) mengatakan dalam penelitiannya jika ada pengaruh antara tingkat pendapatan pada kepatuhan wajib pajak. Namun, (Widi et al., 2020) menemukan tidak adanya pengaruh antara tingkat pendapatan pada kepatuhan wajib pajak.

H2 : Tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Program Pemutihan PKB Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Jika kendaraan tidak membayarkan pajaknya secara tepat waktu, mereka akan dikenakan sanksi administratif. Karena itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan pemutihan untuk menghapus sanksi administratif untuk kendaraan yang terlambat membayar pajak. Penelitian Erin et al., (2022) mengatakan jika adanya pengaruh program pemutihan PKB pada kepatuhan wajib pajak. Penelitian (Sasana et al., 2021) mengemukakan tidak terdapat adanya pengaruh antara program pemutihan PKB pada kepatuhan wajib pajak.

H3 : Program pemutihan PKB berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Pembebasan BBNKB, Tingkat Pendapatan dan Program Pemutihan PKB Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Tingkat pendapatan mempunyai kontribusi yang besar pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak, karena wajib pajak yang berpendapatan rendah umumnya akan lebih memilih mencukupi kebutuhan sehari-harinya, mereka akan kesulitan membayar pajaknya yang menyebabkan ketidakpatuhan. Adanya bantuan berupa kebijakan bisa membantu pengurangan biaya selama program-program pemutihan maupun pembebasan BBNKB, terutama yang tingkat pendapatannya cukup untuk membayar memenuhi kebutuhan hidupnya. Wajib pajak dapat diminta untuk membayar pajak melalui program pemutihan dan pembebasan BBNKB.

H4 : Pembebasan BBNKB, Tingkat Pendapatan dan Program Pemutihan PKB berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## METODE PENELITIAN

Pendekatan kuantitatif digunakan dalam penelitian ini. Populasi sebanyak 122.742 orang diambil menjadi sampel menggunakan rumus slovin, dan 100 responden wajib pajak terdaftar pada pppd kota Sukabumi adalah ukuran sampelnya. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan non probability sampling yaitu *Accidental sampling*. *Accidental sampling* merupakan teknik pengumpulan secara kebetulan dari individu yang dijumpai peneliti jika dianggap sesuai sebagai sumber data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Coba Instrumen

#### Uji Validitas

Jika pernyataan-pernyataan pada kuesioner dapat memeberikan pemahaman, mampu mengukur yang dimaksudkan. Maka uji validitas dilakukan untuk mengukurnya untuk melihat validitas suatu kuesiner.

**Tabel 1**  
**Hasil Uji Validitas**

Variabel	Pertanyaan	R-hitung	R-tabel	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y.1	0,733	0,1966	<b>Valid</b>
	Y.2	0,673	0,1966	<b>Valid</b>
	Y.3	0,789	0,1966	<b>Valid</b>
	Y.4	0,812	0,1966	<b>Valid</b>
	Y.5	0,693	0,1966	<b>Valid</b>
Pembebasan BBNKB (X1)	X1.1	0,717	0,1966	<b>Valid</b>
	X1.2	0,642	0,1966	<b>Valid</b>
	X1.3	0,740	0,1966	<b>Valid</b>
	X1.4	0,809	0,1966	<b>Valid</b>
Tingkat Pendapatan (X2)	X2.1	0,532	0,1966	<b>Valid</b>
	X2.2	0,511	0,1966	<b>Valid</b>
	X2.3	0,904	0,1966	<b>Valid</b>
	X2.4	0,913	0,1966	<b>Valid</b>
Program Pemutihan PKB (X3)	X3.1	0,786	0,1966	<b>Valid</b>
	X3.2	0,816	0,1966	<b>Valid</b>
	X3.3	0,846	0,1966	<b>Valid</b>
	X3.4	0,777	0,1966	<b>Valid</b>

(Sumber : Data diolah dengan SPSS.29, 2024)

Hasil uji validitas dalam penelitian ini untuk item pernyataan, karena nilai dari perhitungan r-hitung > r-tabel jadi disimpulkan bahwa item valid.

## Uji Reliabilitas

Jika suatu instrumen secara konsisten menghasilkan hasil yang sama setelah dilakukan berulang-ulang pada pengukuran terhadap subjek yang sama, maka instrumen tersebut dianggap memiliki reliabilitas yang sempurna (Kusumastuti et al., 2020:51). Metode untuk mengukur kuesioner yang berfungsi sebagai indikator variabel adalah reliabilitas. Respon responden terhadap kuesioner dianggap dapat diandalkan jika konsisten atau stabil sepanjang waktu.

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

<b>Reliability Statistics</b>			
Variabel	Cronbach's Alpha	Nilai Kritis	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,793	0,60	<b>Reliabel</b>
Pembebasan BBNKB (X1)	0,705	0,60	<b>Reliabel</b>
Tingkat Pendapatan (X2)	0,725	0,60	<b>Reliabel</b>
Program Pemutihan PKB (X3)	0,807	0,60	<b>Reliabel</b>

(Sumber : Data diolah dengan SPSS.29, 2024)

Dari hasil tabel diatas, setiap instrument memiliki Cronbach alpha > 0,60 semua instrumen dianggap handal (reliable)

## Uji Asumsi Klasik

### Uji Normalitas

Memastikan model regresi terdistribusi teratur. Uji *Kolmogorov Smirnov* dipakai pada penelitian ini karena banyak manfaatnya, seperti kesesuaiannya untuk penelitian kuantitatif dan kapasitasnya untuk menganalisis data dalam jumlah besar.

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Normalitas**

<b>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</b>			
			Unstandardized Residual
N			100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean		.0000000
	Std. Deviation		2.05252471
Most Extreme Differences	Absolute		.087
	Positive		.087
	Negative		-.053
Test Statistic			.087
Asymp. Sig. (2-tailed) <sup>c</sup>			.058
Monte Carlo Sig. (2-tailed) <sup>d</sup>	99% Confidence Interval	Lower Bound	.056
		Upper Bound	.068

(Sumber : Data diolah dengan SPSS.29, 2024)

Hasil uji normalitas memakai *Kolmogorov Smirnov* Test terlihat bahwa jika Asymp. Sig. (2-tailed) 0,58 > 0,05 ini berarti distribusi normal dari hasil penelitian ini.

### Uji Multikolinearitas

Untuk mengidentifikasi digunakan terdapat hubungan atau korelasi antar variabel independen dalam model regresi.

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

No	Variabel	Collinearity Statistics		
		Tolerance	VIF	Keterangan
1.	Pembebasan BBNKB (X1)	0,816	1,225	Tidak terjadi Multikolinearitas
2.	Tingkat Pendapatan (X2)	0,966	1,035	Tidak terjadi Multikolinearitas
3.	Program Pemutihan PKB(X3)	0,820	1,220	Tidak terjadi Multikolinearitas

(Sumber : Data diolah dengan SPSS.29, 2024)

Data diatas dapat disimpulkan berdasarkan nilai toleransi untuk ketiga variabel bebas tidak terjadi multikolinieritas. Terlihat dari nilai toleransi dan  $VIF > 0,1$  dan nilai  $VIF < 10$ .

### Uji Heteroskedastisitas

Untuk mengidentifikasi adanya ketidakcocokan varian residual yang diamati dengan yang lain dari satu pengamatan dalam model regresi.

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Variabel	Sig	Alpha	Keterangan
Pembebasan BBNKB (X1)	0,298	0,05	Bebas Heteroskedastisitas
Tingkat Pendapatan (X2)	0,727	0,05	Bebas Heteroskedastisitas
Program Pemutihan PKB(X3)	0,524	0,05	Bebas Heteroskedastisitas

(Sumber : Data diolah dengan SPSS.29, 2024)

Uji heteroskedastisitas ini memakai uji glejser, menghasilkan nilai sig > alpha (0,05) jadi model regresi dalam penelitian terbebas dari adanya gejala heteroskedasitas.

### Regresi Linier Berganda

Regresi yang memiliki 1 variabel terikat serta mempunyai lebih banyak variabel bebas.

**Tabel 6**  
**Hasil Uji Regresi Linier Berganda**

		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.826	3.025		1.926	.057
	Pembebasan BBNKB	.390	.154	.252	2.537	.013
	Tingkat Pendapatan	.252	.107	.215	2.358	.020
	Program Pemutihan PKB	.267	.125	.211	2.132	.036

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

(Sumber : Data diolah dengan SPSS.29, 2024)

Model regresi berganda menunjukkan nilai koefisien variabel X1 yaitu 0,390, X2 yaitu 0,252 dan X3 yaitu 0,267 dan nilai konstanta 5,826. Hasil persamaan regresi yang diperoleh :

$$Y = 5,826 + 0,390 + 0,252 + 0,267 + e$$

Dari koefisien masing-masing dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Nilai Korelasi positif variabel X1, X2, X3 terhadap variabel kepatuhan wajib pajak ditunjukkan dengan nilai konstanta (a) sebesar 5,826.
- Untuk variabel X1 Koefisien regresi sebesar 0,390 maka jika kenaikan 1%, dialami oleh X1 sebesar 0,390 kepatuhan wajib pajak akan bertambah.
- Untuk variabel X2 Koefisien regresi sebesar 0,252 maka jika kenaikan 1%, dialami oleh X2 sebesar 0,0252 kepatuhan wajib pajak akan bertambah.
- Untuk variabel X3 Koefisien regresi sebesar 0,267 maka jika kenaikan 1%, dialami oleh X3 sebesar 0,267 kepatuhan wajib pajak akan bertambah

## UJI HIPOTESIS

### Uji Parsial (uji t)

Mencari besaran dari pengaruh satu variable independent mempengaruhi variable dependen secara individual.

**Tabel 7**  
**Hasil Uji t**

Model	t-hitung	t-tabel	Sig
1 Pembebasan BBNKB (X1)	2,537	1,166	0,013
Tingkat Pendapatan (X2)	2,358	1,166	0,020
Program Pemutihan PKB(X3)	2,132	1,166	0,036

(Sumber : Data diolah dengan SPSS.29, 2024)

Terlihat jika nilai significance 0,05 dan nilai t-tabel 1,166 diperoleh dari perhitungan  $df = n-k = 100-4 = 96$ . Berikut penjelasan dari setiap variabel bebas dalam penelitian :

- Hipotesis diterima, pengujian X1 terhadap Y, dilihat dari table di atas nilai thitung 2,537 > nilai ttabel 1,166. Nilai sig 0,013 < 0,05. Maka variable X2 berpengaruh terhadap variable Y
- Hipotesis diterima, pengujian X2 terhadap, dilihat dari table di atas nilai thitung 2,358 > nilai ttabel 1,66. Nilai sig 0,020 < 0,05. Maka variable X3 berpengaruh terhadap variable Y
- Hipotesis diterima, pengujian X3 terhadap Y, dilihat dari table di atas nilai thitung 2,132 > nilai ttabe yaitu 1 1,166. Juga sig 0,036 < 0,05. Jadi variable X1 berpengaruh terhadap variable Y

### Uji Simultan (uji f)

Melihat jika variabel dependen mempengaruhi variabel independen secara bersamaan.

**Tabel 8**  
**Hasil Uji f**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	123,927	3	41,309	9,508	,000 <sup>b</sup>
Residual	417,073	96	4,345		

Total	541,000	99
-------	---------	----

(Sumber : Data diolah dengan SPSS.29, 2024)

Hasil uji F dapat dilihat jika nilai sig 0,000 dan nilai  $F_{hitung}$  9,508 berdasarkan perhitungan  $df_1$  yaitu 3 dan  $df_2$  yaitu 96 dengan tingkat sig 5%. Hal tersebut menunjukkan jika nilai sig  $0,000 < 0,005$  serta  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $9,508 > 2,699$ ). Maka hipotesis diterima sehingga ada pengaruh simultan variable  $X_1.X_2.X_3$  terhadap  $Y$ .

### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Pada dasarnya menunjukkan seberapa baik model menjelaskan varias variabel dependen.

**Tabel 7**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.737 <sup>a</sup>	.543	.529	1.042

(Sumber : Data diolah dengan SPSS.29, 2024)

Nilai adjusted r square 0,529 dari uji koefisien determinasi maka disimpulkan bahwa pengaruh variabel yang ada dalam penelitian ini berpengaruh 52,9%. Sementara sisanya dipengaruhi variabel yang tidak ada di penelitian ini sekitar 47,1%. Besaranya pengaruh variabel lainnya ini disebut *error*.

### KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas peneliti menyimpulkan bahwa secara parsial dari variable bebas yang ada dalam penelitian yaitu Pembebasan BBNKB, Tingkat Pendapatan dan Program Pemutihan PKB terdapat adanya pengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak di kota sukabumi, sedangkan secara simultan juga terdapat pengaruh signifikan antara Pembebasan BBNKB, Tingkat Pendapatan dan Program Pemutihan PKB terhadap kepatuhan wajib pajak kota sukabumi.

### DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, N. P. , Syafitri, L. , & Angraini, L. D. (2024). Pengaruh Tingkat Pendapatan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada Pengemudi Ojek Online Kota Palembang. *FINANCIAL: JURNAL AKUNTANSI*, 10(1), 63–75.
- Alifatu Mazidah. (2022, June 23). *Mengenal Perbedaan Pajak Pusat dan Pajak Daerah*. <https://ortax.org/mengenal-perbedaan-pajak-pusat-dan-pajak-daerah>
- Cellynia, D., & Marlinah, A. (2022). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Jakarta Barat. *Media Ilmiah Akuntansi*, 10(1), 57–64. <http://mia.iaikapddkijakarta.id>

- Cong, J. , & Agoes, S. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, 1(2), 292–299. <https://doi.org/https://doi.org/10.24912/jpa.v1i2.4702>
- Erin, E. , Balliyand, A. F. Z. , Murtanto, M. , & Faisal, A. R. (2022). The Effect of Motor Vehicle Tax Bleaching Program on Taxpayer’s Behavior through the Mediation of Tax Paying Intention in Lampung Province. *International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 5(1), 172–179. <https://doi.org/10.33258/birci.v5i1.3590>
- Fatmawati, S., & Adi, W. S. (2022). Pengaruh Kesadaran Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Tingkat Pemahaman Pajak, Tingkat Pendapatan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Samsat Kota Surakarta). *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 883–890.
- Garis NB. (2023, October 26). *Walah, 4.000 Kendaraan di Kota Sukabumi Belum Daftar Ulang dan Nunggak Belum Bayar Pajak*. <https://www.radarjabar.com/jawa-barat/95110647161/walah-4000-kendaraan-di-kota-sukabumi-belum-daftar-ulang-dan-nunggak-belum-bayar-pajak?page=2>
- Lestari, A. , Astriani, D. , & Rachpriliani, A. (2023). The effect of the pemutihan program, exemption from Transfer fees and mobile samsat on motor vehicle Taxpayer compliance (survey of the one-roof single Administrative system in karawang district). *Proceeding International Conference on Religious & Cultural Sciences Peneleh Research Institute*, 5, 90–102.
- Pranata, A., Nurmala, & Arifin A.M. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, dan Pemutihan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan). *Jurnal Akuntansi*, 14(2), 319–329.
- Sasana, L., Indrawan, I., & Hermawan, R. (2021). Pengaruh Program Pemutihan Pajak dan Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 5(2), 127–134.
- Silviani, E. (2024). Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Kualitas Pelayanan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT. Samsat Medan Utara. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(3), 1867–1882.
- Sumarno Manrejo. (2023). *KEPATUHAN PAJAK Sebuah Kajian Berbasis Pengetahuan*.
- Widi, G. , Suharno, & Sunarti. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Surakarta). *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 17(2).